

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
SWASTA YANG MEMPERSULIT PENERIMAAN PASIEN**



Diajukan Oleh :

BAGUS WIRA SAPUTRA

NPM : 100510241

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SWASTA YANG
MEMPERSULIT PENERIMAAN PASIEN**



Diajukan Oleh :

BAGUS WIRA SAPUTRA

NPM : 100510241

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 11 Juni 2015

Dr. G. Widiartana, SH., M. Hum.

Tanda Tangan:.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Endro Susilo, SH. LLM.

- I. Judul** : Pertanggungjawaban Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan Pasien
- II. Nama** : Bagus Wira Saputra, Dr. G. Widiartana, SH., M. Hum.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The background of this research is “Everyone has the right to obtain health service. Hospital as a health service has responsibility for providing services to everyone. There are some hospitals that refuse patients for various reasons that are not clear”. With the formulation of the problem as follows : how is the form of criminal liability for the private hospital which compound the recruitment of patients. The research method by means of : this research is normative legal, source of data in this study consist of data and primary data, research studies focus on the provisions of the applicable legislation. Criminal Liability of Hospitals in the relief of patients regulated in law No. 36 of 2009 on health. The conclusion that Hospitals in accepting the patients to provide relief to the prospective patients should attach a great importance to safety of life of patients in advance, rather than concerned with the cost of the Hospitals. Hospitals which more concerned with the cost and benefits without prioritize patients’ lives or even refuse patients in need of medical care may be liable in accordance with the legislation in force.

Key word : Hospitals, criminal liability, patients, legislation

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju suatu negara, semakin pesat pula tuntutan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu fasilitas yang di butuhkan oleh masyarakat Indonesia yaitu dalam aspek kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan hal dasar dan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah.

Dunia kesehatan khususnya rumah sakit mempunyai tata cara dalam pelayanannya. Setiap rumah sakit mempunyai administratif yang berbeda-beda menurut ketentuan masing-masing rumah sakit. Ketentuan rumah sakit di Indonesia tidak terlepas dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia banyak masyarakat kurang mampu mengalami kesulitan dalam pembayaran administrasi rumah sakit. Hal itu dapat memberatkan masyarakat, karena di satu sisi masyarakat kurang mampu membutuhkan pelayanan medis pertama dan penanganan cepat dari rumah sakit. Menurut kode etik rumah sakit, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (*emergency*) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu.¹ Maka dari itu saya membuat sebuah judul penelitian hukum yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SWASTA YANG MEMPERSULIT PENERIMAAN PASIEN”**

¹ Kusuma Astuti, Endang. Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009 (hal. 62)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana bagi rumah sakit swasta yang mempersulit penerimaan pasien ?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²

Serta di dukung dengan Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN

A. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien

1. Tugas dan tanggung jawab Rumah Sakit

Tugas Rumah Sakit yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

2. Kode Etik Rumah Sakit

Dalam pelayanan Rumah Sakit di Indonesia memerlukan kode etik, kode etik ini berguna supaya dalam pelayanan Rumah Sakit tetap memusatkan kepada pelayanan medis yang maju dan berguna bagi masyarakat luas dan khususnya bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis pertama. Kode etik Rumah Sakit di Indonesia disusun oleh organisasi perumahsakitannya dari seluruh Indonesia, yakni peraturan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau juga yang disingkat PERSI. Etika yang disusun oleh PERSI untuk seluruh Rumah Sakit di seluruh Indonesia mencakup :

- a. Kewajiban umum Rumah Sakit,
 - b. Kewajiban Rumah Sakit terhadap masyarakat,
 - c. Kewajiban Rumah Sakit terhadap pasien,
 - d. Kewajiban Rumah Sakit terhadap karyawan di Rumah sakit,
- Kewajiban Rumah Sakit terhadap Rumah Sakit yang lainnya.

3. Hak dan kewajiban Rumah Sakit

Rumah Sakit di mata hukum juga merupakan badan hukum (*rechpersoon*), rumah sakit juga berhubungan dengan pasien dan masyarakat. Rumah Sakit juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang ada di dirinya. Adapun, hak rumah sakit adalah sebagai berikut,

1. Setiap Rumah Sakit dapat membuat peraturan Rumah Sakitnya sendiri, yang dimaksudkan dengan membuat peraturan Rumah Sakit adalah membuat peraturan – peraturan khusus yang diberlakukan dalam Rumah Sakit tersebut, seperti halnya dengan peraturan jam besuk, menggunakan sarana dan prasarana Rumah Sakit, dan lain sebagainya.
2. Mensyarakatkan pasien harus menaati segala peraturan Rumah Sakit baik itu dalam pengobatan maupun saat berada dalam Rumah Sakit tersebut.
3. Mensyarakatkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.
4. Memilih serta menyeleksi tenaga dokter yang akan dipekerjakan pada Rumah Sakit tersebut, hal ini berhubungan dengan persoalan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap personalia sehubungan dengan doktrin Hubungan Majikan Karyawan.
5. Menuntut pihak – pihak yang melakukan wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pasien maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Rumah Sakit tersebut.

4. Tanggung Jawab Rumah Sakit kepada pasien

Dalam hal pelayanan Rumah Sakit, perawatan dan pengobatan terhadap pasien yang terjadi di dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab penuh adalah Rumah Sakit itu sendiri. Pengertian yang diterangkan sering juga disebut dengan *Doktrin Corporate Liability*.

Secara tegas tanggung jawab Rumah Sakit dalam pelayanan pasien diemban oleh Rumah Sakit tersebut dan Rumah Sakit tidak dapat menolak pasien dengan alasan apapun, yang diutamakan adalah keselamatan pasien.

B. Hak dan Tanggung Jawab Pasien

Dalam pelayanan kesehatan antara Rumah Sakit dengan pasien, pasti ada hak dan kewajiban yang diterima ataupun harus dilaksanakan oleh pasien atau Rumah Sakit. Dalam hubungan pelayanan kesehatan, pasien sebagai penerima pelayanan dan Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan. Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan harus melaksanakan kewajibannya, harus menerima hak dari pasien. Sebaliknya pasien sebagai penerima pelayanan juga harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Kewajiban – kewajiban diuraikan sebagai berikut :

1. Pasien dan keluarganya harus menaati segala peraturan yang berlaku di Rumah Sakit tersebut.
2. Pasien harus memberikan informasi yang sejujur – jujur tentang semua penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.
3. Pasien wajib mematuhi segala instruksi dokter dan perawat yang ada di Rumah Sakit tersebut.
4. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk mematuhi dan memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani oleh pasien.

5. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit/dokter.

C. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pasien

Rumah Sakit sebagai *rechpersoon* yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan suku, ras, agama dan kepercayaan tidak boleh menelantarkan pasien atau bahkan orang yang dalam kondisi gawat darurat membutuhkan pertolongan. Rumah Sakit tidak dapat menolak pasien yang membutuhkan pertolongan, bahkan Rumah Sakit harus menolong dan memberikan pelayanan demi nyawa hidup pasien tanpa memintikan biaya dan administrasi untuk Rumah Sakit tersebut.

Rumah Sakit harus mementingkan keselamatan jiwa pasien yang sesuai dengan Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Rumah Sakit dilarang menolak pasien dan tidak mementingkan uang muka terlebih dahulu. Fenomena yang terjadi adalah banyak Rumah Sakit yang menolak pasien yang tidak mampu dengan berbagai macam alasan. Pasien yang terlantar tersebut menjadi cacat bahkan mati karena terlambat mendapat penanganan.

1. Fakta Hukum Penolakan Pasien Oleh Rumah Sakit

Berikut deretan fakta hukum pendukung penulisan yang diangkat dari berita di internet yaitu,

1. Risma Alfian, bocah pasangan Suharsono (25) dan Siti Rohmah (24), sudah empat belas bulan tergolek lemah di atas tempat tidurnya. Kepalanya yang terus membesar membuat Risma tidak bisa bangun. Sejak umur satu bulan, Risma sudah divonis terkena *hydrocephalus* (kelebihan cairan di otak manusia sehingga kepala penderita semakin besar). Bidan yang menerima imunisasi, meminta Risma segera menjalani operasi atas kelainan kepalanya itu. Operasi tidak serta merta bisa dilakukan lantaran butuh biaya yang begitu besar untuk mendanainya. Akhirnya pasangan Suharsono dan Siti Rohmah pasrah terhadap penyakit yang menggrogoti tubuh anaknya itu.³
2. Kompas.com menulis tentang, seorang pasien bernama Ana Murdika (15) meninggal dunia,sabtu (9/3/2013) setelah tidak diterima oleh empat rumah sakit untuk dirawat. Ana mengeluh sakit dibagian perut kepada orang tuanya pada Salasa, pukul 14.00. sorenya, orang tuanya membawa Ana ke RS Firdaus, Jakarta Utara. “ Ana dibawa ke Rumah Sakit Firdaus. Dua hari dirawat di sini, keadaan Ana memburuk. Keluarga meminta Ana dipindah ke RS Islam Sukapura. RS Islam Suka Pura mengatakan kamar penuh Ana hanya bias dirawat sementara di Instalasi Gawat Darurat. Keluarga diberi waktu 4 jam untuk mencari Rumah Sakit lain. Empat Rumah Sakit didatangi tapi menolak semua,” ujar ayah Ana. Endang Rukmana. Empat RS dimaksud keseluruhannya berada di Jakarta Utara. Empat RS itu yakni

³ http://www.indosiar.com/ragam/masyarakat-miskin-bakal-sulit-sehat_61938.html

RS Koja, RS Firdaus, RS pelabuhan, dan RS Mulya Sari. Ketiga RS pertama menolak dengan alasan kamar penuh. Sementara RS Mulia Sari menolak karena tidak menerima pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS). “ada yang menolak karena kamar penuh. Kalau RS Mulia Sari menolak karena tidak mau menerima pasien KJS,” ujar Ayu, kakak kandung almarhum. Sementara itu, pihak empat rumah sakit belum bias dihubungi untuk klarifikasi. Menanggapi hal ini, wali kota Jakarta Utara Bambang Sugiono mengatakan akan memerintahkan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara untuk menanyakan ke pihak RS.” Jika terbukti menolak, akan diberi sanksi. Saya juga perlu lihat dulu, apakah 4 RS ini termasuk 88 RS penerima KJS,” ujarnya.⁴

Pimpinan Rumah Sakit yang lebih mementingkan biaya dan keuntungan tanpa mementingkan nyawa dan bahkan menolak pasien yang membutuhkan pelayanan medis dapat dipidanakan. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang jelas tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan juga bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (*emergency*) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu,

⁴ <http://megapolitan.kompas.com/>

hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

1. Pasal 32 ayat (1) :

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

2. Pasal 32 ayat (2) :

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pemimpin Rumah Sakit yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

1. Pasal 190 ayat (1) :

Pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Pasal 190 ayat (2) :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam bab I yang terdahulu maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

Rumah sakit sebagai rechpersoon harus mendapatkan sanksi pidana apabila rumah sakit menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis tetapi tidak dilakukan pelayanan medis oleh rumah sakit. Tidak hanya pemimpin Rumah Sakit saja yang mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) tetapi rumah sakit sebagai rechpersoon harus mendapatkan sanksi pidana juga. Jika dilihat dari fakta yang diangkat oleh penulis, rumah sakit dan pemimpin fasilitas rumah sakit selalu tidak dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan masyarakat yang menjadi pasien dan membutuhkan pertolongan medis mengalami kerugian, kerugian tersebut berupa pasien mengalami kecacatan bahkan kematian karena tidak mendapatkan pelayanan medis dari rumah sakit.

2. Saran

Pertanggungjawaban pidana dalam penerimaan pasien di Rumah Sakit Swasta sering kali ada persoalan tentang dipersulitnya bahkan tidak diterimanya calon pasien yang membutuhkan perawatan medis sedangkan penyakit pasien mengancam jiwanya. Oleh karena itu, usaha – usaha yang diperhatikan agar masalah pertanggungjawaban penerimaan pasien Rumah Sakit swasta mengutamakan pasien yang membutuhkan perawatan medis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam memberikan pengertian kepada Rumah Sakit agar tidak terjadi penelantaran calon pasien yang membutuhkan perawatan medis.
2. Sebagai pemerintah lebih mengawasi dan memberikan penyuluhan terhadap Rumah Sakit agar Rumah Sakit lebih mengutamakan keselamatan jiwa pasien yang membutuhkan perawatan medis daripada kepentingan bisnis semata.
3. Tidak hanya pemilik atau pemimpin Rumah Sakit saja yang mendapat sanksi Pidana tetapi Rumah Sakit sebagai Korporasi dan *rechpersoon* harus menerima sanksi pidana apabila menolak atau mempersulit pasien dalam keadaan gawat darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kusuma Astuti, Endang. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta

Tengker, Freddy, 2007. *Hak Pasien*, CV. Mandar Maju, Bandung

Hanafiah, Jusuf dan Amir, Amri, 2007. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Jakarta*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. PT Rineka Cipta,
Jakarta

Ali, Mahrnun, 2008. *Kejahatan Korporasi*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Siswari, Sri, 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada,
Tangerang

Supadan, Suryani, 2008. *Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan*, Buku
Kedokteran EGC, Jakarta

Supriadi, Wila, 2001. *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Jakarta

Perundang – Undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Skripsi :

Maharani Varaputri Kulalein. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai
Konsumen Jasa Dibidang Pelayanan Medis Yang Diselenggarakan Oleh Rumah
Sakit, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Henggar Jati. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana
Malpraktek Dokter, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Margarita Veani Prajati. Tanggung Jawab Rumah Sakit Privat Di Bidang
Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu, Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Website :

http://www.indosiar.com/ragam/masyarakat-miskin-bakal-sulit-sehat_61938.html

<http://megapolitan.kompas.com/>